



## Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Terlantar Di Kota Jakarta Timur

Rahel<sup>1</sup>, Abdul Wahab<sup>2</sup>

Fakultas Perlindungan Masyarakat, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [rahelclaret@gmail.com](mailto:rahelclaret@gmail.com), [abdul@ipdn.ac.id](mailto:abdul@ipdn.ac.id)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 07 Mei 2026

### ABSTRACT

*The synergy between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Social Affairs Office in fostering neglected children in East Jakarta is essential in maintaining public order and social welfare. However, its implementation still encounters several challenges, including limited human resources, suboptimal coordination, and insufficient follow-up programs. This study aims to analyze the synergy between Satpol PP and the Social Affairs Office and to identify supporting and inhibiting factors in the development of neglected children. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, applying Doctoroff's synergy theory. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation, while data analysis uses the Miles and Huberman model. The results show that synergy has been implemented through joint operations, outreach activities, and rehabilitation programs in social institutions. Supporting factors include regulatory frameworks and institutional commitment. However, the collaboration is not yet optimal due to limited personnel, inadequate facilities, and low community participation. Furthermore, sustainability issues arise when children return to society. In conclusion, synergy has been relatively effective but requires stronger coordination and sustainable programs to improve outcomes.*

**Keywords:** Synergy, Satpol PP, Social Affairs Office, Neglected Children, Public Order

### ABSTRAK

*Sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial dalam pembinaan anak terlantar di Kota Jakarta Timur merupakan hal yang penting dalam menjaga ketertiban umum dan kesejahteraan sosial. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi yang belum optimal, serta kurangnya program tindak lanjut yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Sosial serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan anak terlantar. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan teori sinergitas Doctoroff. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas telah berjalan melalui operasi penertiban, penjangkauan, dan pembinaan di panti sosial. Faktor pendukung meliputi regulasi dan komitmen kelembagaan. Namun, sinergitas belum optimal akibat keterbatasan personel, sarana prasarana yang belum memadai, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, terdapat kendala dalam keberlanjutan pembinaan setelah anak kembali ke lingkungan masyarakat. Kesimpulannya, sinergitas telah berjalan cukup baik, tetapi perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi dan program berkelanjutan agar hasilnya lebih efektif.*

**Kata Kunci:** Sinergitas, Satpol PP, Dinas Sosial, Anak Terlantar, Ketertiban Umum.

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan anak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pembangunan suatu negara. Dalam konteks Indonesia, komitmen terhadap perlindungan anak telah ditegaskan secara konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak terlantar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab negara, termasuk dalam memberikan perlindungan dan pembinaan bagi anak terlantar melalui berbagai program rehabilitasi sosial, pendidikan, dan pemberdayaan (Hajad et al., 2023).

Dalam praktiknya, permasalahan anak terlantar masih menjadi tantangan serius, terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi. Kota-kota besar seperti DKI Jakarta menghadapi dinamika sosial yang kompleks, termasuk meningkatnya jumlah anak yang hidup di jalanan akibat faktor kemiskinan, disfungsi keluarga, serta dampak sosial ekonomi lainnya. Anak terlantar seringkali berada dalam kondisi rentan tanpa pengawasan orang tua, hidup di ruang publik seperti terminal, pasar, dan persimpangan jalan, serta berpotensi terlibat dalam aktivitas yang mengganggu ketertiban umum (Darmayanthi & Kurniawan, 2021). Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan anak itu sendiri, tetapi juga pada stabilitas sosial dan keamanan lingkungan masyarakat.

Secara global, permasalahan anak terlantar juga menjadi perhatian serius. UNICEF memperkirakan bahwa sekitar 2,7 juta anak di seluruh dunia hidup dalam perawatan institusional akibat berbagai faktor seperti kemiskinan, konflik, dan kekerasan dalam keluarga (Badriah, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa isu anak terlantar merupakan masalah multidimensional yang memerlukan pendekatan terpadu lintas sektor. Di Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga mencatat bahwa permasalahan anak terlantar merupakan bagian dari penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang masih membutuhkan penanganan serius (Ayuningtyas & Setyowati, 2023).

Dalam konteks daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penertiban terhadap aktivitas yang mengganggu ketertiban umum, termasuk keberadaan anak terlantar di ruang publik. Di sisi lain, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab dalam memberikan pembinaan dan rehabilitasi sosial kepada anak-anak tersebut setelah proses penertiban dilakukan. Dengan demikian, kedua instansi ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam menangani permasalahan anak terlantar (Ardianto et al., 2019).

Namun demikian, pelaksanaan tugas tersebut tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya sinergi yang kuat antarinstansi. Sinergitas menjadi kunci

---

dalam memastikan bahwa penanganan anak terlantar tidak hanya berhenti pada proses penertiban, tetapi juga berlanjut pada tahap pembinaan dan reintegrasi sosial. Konsep sinergitas menekankan pentingnya kerja sama, komunikasi, kepercayaan, serta koordinasi yang efektif antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama secara lebih optimal (Ariska et al., 2021). Dalam konteks ini, sinergi antara Satpol PP dan Dinas Sosial menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang komprehensif.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu serupa. (Subiyanto, 2020) menemukan bahwa implementasi kebijakan pelayanan anak jalanan sangat dipengaruhi oleh kapasitas pelaksana serta kualitas koordinasi antarinstansi. Penelitian ini menekankan bahwa lemahnya koordinasi dapat menghambat efektivitas program kesejahteraan sosial. Selanjutnya, (Warfandu, 2024) menunjukkan bahwa implementasi program kesejahteraan sosial anak di Jakarta Timur belum sepenuhnya optimal karena adanya kendala dalam harmonisasi kebijakan dan koordinasi lintas sektor. Penelitian lain oleh (Amriyadi et al., 2024) mengungkapkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam perlindungan PMKS masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sarana prasarana serta rendahnya kepatuhan masyarakat.

Selain itu, (Natika & Rinjani, 2022) menyoroti pentingnya peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum serta peran Dinas Sosial dalam menjamin kesejahteraan sosial masyarakat, namun sinergi di antara keduanya belum sepenuhnya terintegrasi. Sementara itu, (Susandi & Kusmawati, 2024) menemukan bahwa meskipun terdapat upaya kolaborasi dalam penertiban gelandangan dan pengemis, koordinasi antarinstansi serta dukungan masyarakat masih menjadi tantangan utama. Secara umum, kelima penelitian tersebut menunjukkan bahwa sinergi antarinstansi merupakan faktor penting dalam penanganan masalah sosial, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang belum banyak dikaji secara mendalam. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada implementasi kebijakan atau penanganan PMKS secara umum, tanpa secara spesifik mengkaji sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam konteks pembinaan anak terlantar. Selain itu, sebagian besar penelitian lebih menekankan pada aspek penertiban, sementara aspek pembinaan dan keberlanjutan program rehabilitasi belum menjadi fokus utama. Penggunaan teori sinergitas Doctoroff yang menekankan pada dimensi komunikasi, kepercayaan, umpan balik, dan kreativitas juga masih jarang digunakan dalam kajian terkait penanganan anak terlantar.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan mengkaji secara spesifik sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam pembinaan anak terlantar di Kota Jakarta Timur. Fokus penelitian tidak hanya pada aspek penertiban, tetapi juga pada proses pembinaan dan keberlanjutan program rehabilitasi sosial. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan teori sinergitas Doctoroff untuk menganalisis hubungan antarinstansi secara lebih komprehensif.

---

Kota Jakarta Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi di Provinsi DKI Jakarta, yang berdampak pada tingginya kompleksitas permasalahan sosial, termasuk anak terlantar (BPS DKI Jakarta, 2024). Data Dinas Sosial menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar di wilayah ini mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa permasalahan ini masih belum sepenuhnya teratasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana sinergitas antarinstansi dapat meningkatkan efektivitas pembinaan anak terlantar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam upaya pembinaan anak terlantar di Kota Jakarta Timur? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam penertiban dan pembinaan anak terlantar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian sinergitas antarinstansi pemerintah, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan efektivitas pembinaan anak terlantar. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan anak sebagai bagian dari pembangunan sosial yang berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam pembinaan anak terlantar di Kota Jakarta Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan kondisi sosial secara holistik dan menekankan makna di balik interaksi antarinstansi (Sugiyono, 2023). Penelitian dilaksanakan di lingkungan Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Jakarta Timur, dengan peneliti sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan terdiri dari pejabat Satpol PP, pejabat Dinas Sosial, pekerja sosial, serta anak terlantar yang sedang maupun telah mengikuti program pembinaan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dan observasi partisipatif, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan instansi, serta literatur ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam terkait bentuk sinergitas, kendala, serta strategi pembinaan. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memahami kondisi nyata di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui arsip, laporan, dan catatan kegiatan yang relevan. Teknik analisis data menggunakan

model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2023). Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan informasi yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan proses verifikasi melalui triangulasi sumber dan teknik. Dengan metode ini, diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sinergitas antarinstansi dalam pembinaan anak terlantar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial Kota Jakarta Timur dalam pembinaan anak terlantar telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk koordinasi dan kerja sama lintas sektor. Data yang diperoleh peneliti berasal dari teknik wawancara, observasi lapangan, serta studi dokumentasi yang dilakukan di Kantor Satpol PP, Dinas Sosial, serta salah satu panti sosial di Jakarta Timur. Informasi yang diperoleh dari narasumber sebagai informan utama memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program pembinaan anak terlantar, mulai dari tahap penjangkauan, asesmen, hingga pembinaan lanjutan di panti sosial.

Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa fenomena anak terlantar di Jakarta Timur masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks, sehingga membutuhkan penanganan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga humanis dan berkelanjutan. Studi dokumentasi yang dilakukan peneliti juga memperkuat temuan di lapangan, khususnya terkait dengan kebijakan, program kerja, serta data anak terlantar yang ditangani oleh Dinas Sosial.

Dalam menganalisis hasil penelitian, peneliti menggunakan teori sinergitas dari Doctoroff yang terdiri dari empat dimensi utama, yaitu komunikasi, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas. Keempat dimensi ini digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam pembinaan anak terlantar di Kota Jakarta Timur.

### *Sinergitas Satpol PP dan Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Terlantar di Kota Jakarta Timur*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Sosial telah berjalan dengan pembagian peran yang cukup jelas. Satpol PP berperan sebagai pelaksana penjangkauan dan penertiban anak terlantar di lapangan, sedangkan Dinas Sosial bertanggung jawab dalam proses pembinaan dan rehabilitasi sosial. Sinergitas ini didukung oleh dasar hukum berupa Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban di ruang publik, termasuk terhadap aktivitas yang melibatkan anak terlantar.

Dalam praktiknya, sinergitas ini tidak hanya terlihat dari pembagian tugas, tetapi juga dari adanya koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan antara kedua instansi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kerja sama ini telah mampu menciptakan mekanisme penanganan anak terlantar yang relatif sistematis, mulai dari penjangkauan hingga pembinaan.

## 1. Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung sinergitas pembinaan anak terlantar. Komunikasi yang terjalin tidak hanya bersifat formal melalui dokumen administrasi, tetapi juga informal melalui media komunikasi digital seperti WhatsApp.

Indikator pertama dalam dimensi komunikasi adalah keterbukaan informasi. Berdasarkan temuan penelitian, kedua instansi telah menyediakan akses informasi publik melalui website resmi masing-masing. Hal ini menunjukkan adanya transparansi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi. Keterbukaan informasi ini juga memudahkan koordinasi antarinstansi karena masing-masing pihak dapat memahami peran dan tanggung jawab mitra kerja.

Indikator kedua adalah kejelasan pesan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi formal yang dilakukan melalui surat resmi telah memenuhi standar administrasi yang jelas dan sistematis. Namun demikian, dalam praktik di lapangan masih terdapat potensi perbedaan pemahaman antartetugas, terutama dalam situasi yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, komunikasi informal menjadi pelengkap yang penting dalam memastikan kejelasan informasi.

Indikator ketiga adalah intensitas interaksi. Berdasarkan hasil observasi, interaksi antara Satpol PP dan Dinas Sosial masih bersifat situasional dan belum terjadwal secara rutin. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi lebih bersifat responsif terhadap kondisi di lapangan. Meskipun demikian, komunikasi informal tetap berjalan secara aktif, sehingga koordinasi tetap dapat dilakukan dengan cepat.

## 2. Umpan Balik

Dimensi umpan balik dalam sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Sosial menunjukkan adanya mekanisme respons, evaluasi, dan penyesuaian strategi dalam penanganan anak terlantar.

Indikator pertama adalah respon terhadap pesan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial memberikan respon yang cukup cepat terhadap laporan dari Satpol PP. Hal ini terlihat dari adanya tindak lanjut berupa penerimaan anak terlantar dan proses penanganan lanjutan di panti sosial. Respon yang cepat ini menjadi indikator penting dalam efektivitas sinergitas.

Indikator kedua adalah evaluasi tindakan. Berdasarkan hasil wawancara, evaluasi dilakukan oleh Dinas Sosial setelah anak masuk dalam proses pembinaan. Evaluasi ini mencakup aspek sosial, ekonomi, dan psikologis anak, sehingga penanganan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak.

Indikator ketiga adalah penyesuaian strategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua instansi telah mampu menyesuaikan strategi penanganan anak terlantar berdasarkan kondisi di lapangan. Tidak semua anak ditempatkan di panti sosial, melainkan disesuaikan dengan hasil asesmen yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

### 3. Kepercayaan

Dimensi kepercayaan menunjukkan adanya hubungan kerja yang saling mendukung antara Satpol PP dan Dinas Sosial.

Indikator pertama adalah keandalan mitra kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing instansi telah menjalankan tugasnya secara konsisten sesuai dengan kewenangannya. Satpol PP fokus pada penjangkauan, sedangkan Dinas Sosial fokus pada pembinaan. Pembagian tugas ini mencerminkan adanya keandalan dalam pelaksanaan fungsi masing-masing instansi.

Indikator kedua adalah keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian, keputusan yang diambil dalam penanganan anak terlantar dilakukan melalui koordinasi antara kedua instansi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada keputusan yang bersifat sepihak, melainkan melalui proses diskusi dan pertimbangan bersama.

Indikator ketiga adalah konsistensi tindakan. Hasil observasi menunjukkan bahwa pola kerja antara Satpol PP dan Dinas Sosial telah berjalan secara berulang dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan tugas, sehingga penanganan anak terlantar dapat dilakukan secara sistematis.

### 4. Kreativitas

Dimensi kreativitas menunjukkan kemampuan kedua instansi dalam menghadapi permasalahan anak terlantar yang kompleks dan dinamis.

Indikator pertama adalah kreativitas dalam pemecahan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah mengubah pendekatan penanganan dari yang bersifat represif menjadi lebih persuasif dan humanis. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam membangun kepercayaan anak terlantar.

Indikator kedua adalah penerapan ide baru. Meskipun tidak terdapat inovasi yang sepenuhnya baru, namun terdapat upaya untuk mengoptimalkan metode yang sudah ada, seperti pendekatan komunikasi yang lebih humanis.

Indikator ketiga adalah adaptasi terhadap perubahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua instansi mampu menyesuaikan strategi penanganan berdasarkan kondisi di lapangan. Hal ini terlihat dari fleksibilitas dalam menentukan bentuk pembinaan, baik melalui panti sosial maupun melalui reintegrasi keluarga.

### 5. Peran Panti Asuhan dalam Mendukung Sinergitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa panti sosial memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Sosial. Panti tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan, tetapi juga sebagai pusat pembinaan dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah anak asuh di panti mencapai 130 anak pada tahun 2025 dengan karakteristik yang beragam. Mayoritas anak berada pada usia remaja dan masih aktif dalam pendidikan formal. Hal ini menunjukkan

bahwa pembinaan yang dilakukan lebih berfokus pada pengembangan kemandirian dan kesiapan memasuki dunia kerja.

Selain itu, panti juga memberikan berbagai layanan, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, pembinaan mental, serta pelatihan keterampilan. Program-program ini menunjukkan bahwa panti telah berkembang menjadi lembaga pembinaan yang komprehensif.

Hasil wawancara dengan anak asuh juga menunjukkan bahwa keberadaan panti memberikan dampak positif terhadap kehidupan mereka. Anak-anak merasa mendapatkan perlindungan, pendidikan, serta kesempatan untuk memperbaiki masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa sinergitas antara Satpol PP, Dinas Sosial, dan panti sosial telah memberikan kontribusi yang nyata dalam penanganan anak terlantar.

### ***Faktor Penghambat Sinergitas Satpol PP dan Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Terlantar di Kota Jakarta Timur***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial di Kota Jakarta Timur, masih terdapat berbagai faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas pembinaan anak terlantar. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya berdampak pada proses koordinasi antarinstansi, tetapi juga secara langsung memengaruhi kualitas pelayanan sosial yang diberikan kepada anak terlantar. Kondisi ini menyebabkan penanganan yang dilakukan belum sepenuhnya optimal, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun keberlanjutan pembinaan.

Secara umum, hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini berkaitan dengan aspek internal dan eksternal. Aspek internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia serta ketidakseimbangan kapasitas antarinstansi, sedangkan aspek eksternal berkaitan dengan kondisi anak terlantar itu sendiri serta persepsi masyarakat terhadap keberadaan panti sosial. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan membentuk suatu dinamika yang kompleks dalam pelaksanaan sinergitas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor penghambat ini menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan strategi perbaikan ke depan.

#### **1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama yang menghambat sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam pembinaan anak terlantar di Kota Jakarta Timur. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan jumlah personel yang cukup signifikan antara kedua instansi, di mana Satpol PP memiliki jumlah personel yang jauh lebih besar dibandingkan Dinas Sosial. Ketimpangan ini berdampak pada tidak seimbanginya kapasitas kerja dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Satpol PP sebagai instansi yang bertugas melakukan penertiban dan penjangkauan memiliki keunggulan dalam jumlah personel serta distribusi yang tersebar hingga ke tingkat kelurahan. Hal ini memungkinkan Satpol PP untuk melakukan patroli secara intensif dan menjangkau anak terlantar di berbagai titik wilayah. Sebaliknya, Dinas Sosial memiliki keterbatasan jumlah tenaga, khususnya

pada posisi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial, sehingga tidak mampu menjangkau seluruh wilayah secara optimal.

Akibat dari kondisi tersebut, ketika Satpol PP berhasil menjangkau sejumlah anak terlantar dalam jumlah besar, Dinas Sosial seringkali mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti proses asesmen, pembinaan, serta pendampingan secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan adanya keterlambatan dalam penanganan serta kurang optimalnya proses rehabilitasi sosial yang seharusnya diberikan kepada anak.

Selain itu, keterbatasan SDM juga berdampak pada proses monitoring dan evaluasi pasca pembinaan. Anak-anak yang telah mendapatkan layanan di panti sosial membutuhkan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan reintegrasi sosial. Namun, dengan jumlah tenaga yang terbatas, proses monitoring tidak dapat dilakukan secara intensif, sehingga berpotensi menyebabkan anak kembali ke kondisi sebelumnya.

Hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial menunjukkan bahwa keterbatasan SDM menjadi kendala yang nyata dalam pelaksanaan pembinaan. Beban kerja yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah tenaga yang tersedia, sehingga memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam konteks sinergitas, kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi yang baik tidak akan berjalan optimal tanpa didukung oleh kapasitas sumber daya yang memadai.

Dengan demikian, keterbatasan sumber daya manusia tidak hanya menjadi masalah administratif, tetapi juga berdampak langsung pada efektivitas sinergitas antarinstansi. Ketidakseimbangan kapasitas ini menyebabkan adanya kesenjangan antara kegiatan penjangkauan dan proses pembinaan, sehingga tujuan utama dalam penanganan anak terlantar belum sepenuhnya tercapai.

## 2. Ketidakmampuan Adaptasi Anak terhadap Sistem Pembinaan di Panti Sosial

Selain faktor internal, hambatan dalam sinergitas juga berasal dari faktor eksternal, yaitu ketidakmampuan anak terlantar dalam beradaptasi dengan sistem pembinaan di panti sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua anak yang telah dijangkau dan ditempatkan di panti mampu mengikuti proses pembinaan secara optimal.

Sebagian anak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan panti yang memiliki aturan, jadwal, dan pola kehidupan yang lebih terstruktur. Kondisi ini terutama dialami oleh anak-anak yang sebelumnya terbiasa hidup bebas di jalanan tanpa pengawasan dan aturan yang ketat. Perubahan lingkungan yang drastis seringkali menimbulkan tekanan psikologis, sehingga anak merasa tidak nyaman dan memilih untuk meninggalkan panti.

Fenomena anak yang kabur dari panti menjadi indikator bahwa proses pembinaan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan psikologis dan sosial anak. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Sosial, karena proses rehabilitasi tidak dapat berjalan secara berkelanjutan jika anak tidak berada dalam lingkungan pembinaan.

Dari perspektif sinergitas, kondisi ini juga berdampak pada efektivitas kerja sama antara Satpol PP dan Dinas Sosial. Upaya penjangkauan yang telah dilakukan

oleh Satpol PP menjadi kurang optimal apabila tidak diikuti dengan keberhasilan pembinaan di panti. Dengan kata lain, keberhasilan sinergitas tidak hanya diukur dari jumlah anak yang dijangkau, tetapi juga dari keberhasilan proses rehabilitasi yang dijalankan.

Selain itu, ketidakmampuan adaptasi anak juga menambah beban kerja kedua instansi. Anak yang kembali ke jalanan berpotensi terjaring kembali dalam operasi penertiban, sehingga menciptakan siklus penanganan yang berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa pendekatan yang tepat, proses pembinaan tidak akan memberikan hasil yang berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan pekerja sosial menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan selama ini masih menghadapi tantangan dalam membangun kedekatan emosional dengan anak. Oleh karena itu, diperlukan metode pembinaan yang lebih adaptif dan humanis agar anak dapat merasa nyaman dan bersedia mengikuti proses pembinaan hingga selesai.

### 3. Persepsi Sosial Masyarakat terhadap Penempatan Anak Terlantar di Panti Sosial

Faktor penghambat lainnya yang tidak kalah penting adalah persepsi sosial masyarakat terhadap keberadaan panti sosial dan anak terlantar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat stigma negatif di masyarakat yang memandang anak panti sebagai individu bermasalah atau berasal dari latar belakang keluarga yang kurang baik.

Stigma ini berdampak pada rendahnya penerimaan sosial terhadap anak-anak yang telah menjalani proses pembinaan. Dalam beberapa kasus, anak mengalami kesulitan untuk kembali ke lingkungan masyarakat karena adanya label negatif yang melekat. Hal ini dapat memengaruhi kepercayaan diri anak serta menghambat proses pengembangan diri yang telah dibangun selama di panti.

Selain itu, persepsi masyarakat juga memengaruhi keputusan keluarga dalam menyerahkan anak ke panti sosial. Sebagian keluarga merasa khawatir terhadap pandangan lingkungan sekitar, sehingga enggan memanfaatkan layanan panti sosial meskipun kondisi ekonomi atau sosial tidak mendukung. Akibatnya, banyak anak terlantar yang tidak mendapatkan penanganan secara optimal.

Di sisi lain, terdapat pula pandangan bahwa panti sosial merupakan bentuk pemisahan anak dari keluarga, sehingga dianggap sebagai solusi yang kurang ideal. Persepsi ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap fungsi panti sosial sebagai lembaga pembinaan dan rehabilitasi, bukan sekadar tempat penampungan.

Dalam konteks sinergitas, persepsi masyarakat menjadi faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program pembinaan. Tanpa dukungan masyarakat, proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak tidak akan berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa sinergitas tidak hanya melibatkan instansi pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi. Dengan adanya

---

perubahan persepsi yang lebih positif, diharapkan masyarakat dapat memberikan dukungan yang lebih besar terhadap program pembinaan anak terlantar, sehingga sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Sosial dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

### ***Upaya Mengatasi Hambatan Sinergitas Satpol PP dan Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Terlantar di Kota Jakarta Timur***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai hambatan dalam sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Sosial memerlukan upaya penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada perbaikan internal instansi, tetapi juga mencakup pendekatan yang lebih luas terhadap anak terlantar dan masyarakat.

Salah satu upaya utama yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Penambahan tenaga pekerja sosial serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan menjadi langkah penting untuk mengatasi ketimpangan beban kerja. Selain itu, penyusunan jadwal patroli bersama yang terstruktur dapat meningkatkan koordinasi dan efektivitas penanganan di lapangan.

Upaya lainnya adalah pengembangan metode pembinaan yang lebih adaptif dan humanis. Pendekatan berbasis kebutuhan individu menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kondisi mereka. Selain itu, pendekatan persuasif dan empati dalam proses penjangkauan dan pembinaan dapat membantu anak merasa lebih nyaman dan bersedia mengikuti program hingga selesai.

Selanjutnya, peningkatan edukasi sosial kepada masyarakat juga menjadi langkah strategis dalam mengatasi stigma negatif. Melalui sosialisasi, kampanye media, serta keterlibatan tokoh masyarakat, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih positif terhadap anak terlantar dan fungsi panti sosial. Dukungan masyarakat yang lebih inklusif akan memperkuat proses reintegrasi sosial anak serta meningkatkan keberhasilan program pembinaan.

Dengan demikian, upaya mengatasi hambatan sinergitas harus dilakukan secara terpadu dan melibatkan berbagai pihak. Sinergitas yang kuat tidak hanya bergantung pada koordinasi antarinstansi, tetapi juga pada dukungan sumber daya yang memadai, pendekatan yang tepat terhadap anak, serta penerimaan masyarakat yang positif. Apabila seluruh aspek tersebut dapat berjalan secara seimbang, maka tujuan pembinaan anak terlantar untuk menciptakan kesejahteraan dan kemandirian dapat tercapai secara optimal.

### **SIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam pembinaan anak terlantar di Kota Jakarta Timur telah terjalin melalui pembagian peran yang saling melengkapi. Satpol PP berperan dalam penjangkauan dan penertiban sebagai implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, sedangkan Dinas Sosial melanjutkan proses melalui asesmen, pembinaan, dan rehabilitasi

sosial. Mekanisme penanganan berjalan secara sistematis, dimulai dari penjangkauan, pendataan, hingga pembinaan di panti sosial yang berfungsi sebagai pusat rehabilitasi dan pengembangan kemandirian anak. Namun demikian, sinergitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi yang belum terjadwal secara rutin, serta kendala adaptasi anak dan stigma masyarakat.

Kesimpulan ini mengindikasikan perlunya penguatan koordinasi yang lebih terstruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan metode pembinaan yang adaptif dan humanis. Selain itu, dukungan masyarakat melalui edukasi sosial juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan reintegrasi anak. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas model kolaborasi lintas sektor yang lebih inovatif serta mengeksplorasi pendekatan berbasis komunitas dalam pembinaan anak terlantar guna meningkatkan keberlanjutan program secara lebih komprehensif.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih dapat disampaikan kepada pihak sponsor atau pendanaan, dapat juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan orang-orang terkasih (hindari ucapan terimakasih yang berbunga-bunga) serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Amriyadi, N. H., Kholifah, U. N., Dinata, K. I., & Anggraini, L. (2024). Review Literatur: Perkembangan Sosial Emosional Pada Anak Usia Dini. *On Tradition And Religious Studies*, 3(Agustus).
- Ardianto, E., Komala, L., & Karlinah, S. (2019). *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Pt Simbiosis Rekatama Media., 7.
- Ariska, L., Alamsyah, A., & Junaidi, J. (2021). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar Di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Dinamika Manajemen Dan Kebijakan Publik (Dmkep)*, 1(1). <https://doi.org/10.33369/dinamikapublik.v1i1.19211>
- Ayuningtyas, G. A. T., & Setyowati, K. (2023). Sinergitas Antar Stakeholders Dalam Upaya Percepatan Penurunan Angka Stunting Di Kota Surakarta. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 18(2). <https://doi.org/10.20961/sp.v18i2.78902>
- Badriah, T. L. (2023). Implementasi Hukum Dan Ham Dalam Upaya Perlindungan Anak Terlantar Di Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(4).
- Darmayanthi, N. P. R., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PkSA) Dalam Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Anak Jalanan (Studi Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Timur). *Publika*. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p1-14>
- Hajad, V., Liyana, C. I., Ikhsan, I., & Adela, F. P. (2023). Neglected Children: Whose Responsibility? Politics Of Protection Of Neglected Children In Aceh Province Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 36(2). <https://doi.org/10.20473/mkp.v36i22023.302-315>

- Muchammad Raafi Triyas Susandi, & Ati Kusmawati. (2024). Terapi Spiritual Dalam Mengembangkan Penerimaan Diri Anak Terlantar Di Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1. *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(1). <https://doi.org/10.47861/Khirani.V2i1.834>
- Natika, L., & Rinjani, S. D. (2022). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kabupaten Subang). *The World Of Public Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/Wpaj.V4i1.1346>
- Subiyanto, A. E. (2020). Efektifitas Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Mengenai Larangan Mengamen, Mengemis Dan Pedagang Asongan Di Wilayah Cengkareng Jakarta Barat. *Jca Of Law*.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif). Metode Penelitian Kualitatif.
- Warfandu, R. (2024). Journal Of Indonesian Rural And Regional Government Efektifitas Pelayanan Sosial Dan Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya. *Journal Of Indonesian Rural And Regional Government*, 8(1).